

POLITIK PEMBANGUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA
MENUJU SMART CITY KOTA PALANGKA RAYA

Puput Ratnasari, S.H., M. Hum

Abstrak

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Dalam setiap pembangunan itu terdapat campur tangan politik atau strategi-strategi/aliran tertentu yang digunakan dalam konteks pembangunan mencapai sasarannya dapat juga disebut Politik Pembangunan.

Smart city adalah konsep kota masa depan yang ingin diwujudkan secara nasional agar terwujud kota keberlanjutan yang didukung oleh kapasitas daya saing yang memadai. Kota Palangka Raya adalah salah satu dari provinsi di Indonesia yang melaksanakan pembangunan daerah yang salah satunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan yaitu Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana peran Politik Pembangunan di Kota Palangka Raya menuju Smart City Kota Palangka Raya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau bahan pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menggambarkan peran Politik Pembangunan di Kota Palangka Raya menuju Smart City Kota Palangka Raya.

Kata kunci : Politik Pembangunan, Aktor Pembangunan, Smart City.

1. Pengantar

Menurut Rahardjo (2013:2-3) wilayah nasional terdiri dari daerah – daerah (regional). Pembangunan nasional mendorong berkembangnya pembangunan nasional dan lain pihak pembangunan nasional memperkuat pembangunan nasional. Keduanya antara pembangunan nasional dan pembangunan regional terdapat keterkaitan yang mengisi, sehingga membentuk struktur perekonomian yang kokoh dan kuat. Berbagai macam klasifikasi wilayah pada hakikatnya memperhatikan keanekaan potensi dan kondisi fisik dan ekonomi yang dimiliki oleh masing – masing wilayah, maka tingkat pertumbuhan wilayahnya berbeda – beda, dengan demikian kebijakan perataan tingkat pertumbuhan antar wilayah secara komprehensif dan merata ke seluruh wilayah.

Menurut Budiardjo (2008: 18) pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber yang ada. Selain itu, kekuasaan

(*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat *persuasi* (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*).

Menurut Warjio (2016: 140) politik pembangunan sebagai konsep diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara (politik) atau strategi/aliran tertentu yang digunakan dalam konteks pembangunan mencapai sasarannya. Sesungguhnya pembangunan pada dasarnya adalah hasil dari proses politik yang dilakukan aktor-aktor di dalamnya, oleh pemerintah dengan perangkat-perangkat lain seperti lembaga, partai politik atau bahkan kelompok masyarakat. Aktor-aktor dalam politik pembangunan bukan saja berasal dari dalam negara tetapi juga berasal dari luar negara. Artinya kepentingan internasional juga memainkan peranan penting dalam politikpembangunan

Kota Palangka Raya adalah salah satu dari kota di Indonesia yang melaksanakan pembangunan daerah Yang salah satunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan yaitu a. Tanpa Kemiskinan; b. Tanpa Kelaparan; c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera; d. Pendidikan Berkualitas; e. Kesetaraan Gender; f. Air Bersih dan Sanitasi Layak; g. Energi Bersih dan Terjangkau; h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur; j. Berkurangnya Kesenjangan; k. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; l. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan; m. Penanganan Perubahan Iklim; n. Ekosistem Lautan; o. Ekosistem Daratan; p.

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; dan q. Kemitraan. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana peran Politik pada Pembangunan di Kota Palangka Raya menuju Smart City Kota Palangka Raya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Pembangunan

Menurut pengertian ilmu ekonomi yang ketat, istilah pembangunan secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama (Todaro : 2006). Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan dan meningkatkan produktivitas. Untuk itu sebelum berbicara pembangunan, beberapa para ahli memberikan gagasannya mengenai pembangunan. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Menurut Deddy T. Tikson, bahwa pembangunan dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya yang secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi, transformasi

dalam struktur sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme.

Menurut Todaro dalam Setiawan (2019:72) bahwa pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap - sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional serta akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality), dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan sebagai suatu proses belajar.

2.2 Konsep Politik Pembangunan

Secara filosofi konsep politik pembangunan adalah konsep yang lebih mendalam dalam memahami realitas politik dalam pembangunan. Moeljarto dalam Warjio menjelaskan bahwa politik pembangunan merupakan cara, untuk mencapai tujuan (dasar) pembangunan. Pandangan lain mengenai politik pembangunan juga dijelaskan oleh Zulfi Syarif Koto dalam Warjio sebagai suatu cara atau strategi atau dasar dan model yang dipilih pemerintah dalam melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai yang dianut suatu Negara tertentu dan pada waktu tertentu (*time specified*). Dan pengertian seperti ini politik pembangunan merupakan *political choice* dan di dalamnya terkandung strategi. *Political choice* terhadap beberapa alternatif, menjangkau dari persoalan asas yaitu epistemologi maupun ontologi. Menurut Warjio (2016:106) politik pembangunan

bukan saja mengenai cara atau strategi yang hendak dicapai dalam pembangunan, tetapi juga pemikiran atau ideologi yang termaktub dalam pembangunan dari strategi dan cara yang dijalankan itu yang melibatkan banyak kelompok kepentingan

2.3 Aktor Politik Pembangunan

Aktor politik pembangunan telah menjadi perhatian serius dalam analisis pembangunan. Sebagaimana diungkapkan Scramm dan Lerner (Warjio, 2016) telah merumuskan aktor politik pembangunan yang terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban dan menggerakkan masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu, tidak berarti bahwa ide-ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan sendiri oleh kelompok ini, akan tetapi mereka sekedar merumuskan ide-ide atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah disepakati. Sedangkan perencanaan pembangunan di atas yang paling bawah, disalurkan melalui pertemuan kelompok ataupun permusyawaratan pada lembaga terbawah, secara formal dan informal.
2. Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk: pemberian input (ide,

biaya, tenaga dan lain-lain), pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan serta pemantauan hasil-hasil pembangunan. Dalam kenyataan, pelaksana utama kegiatan pembangunan justru terdiri dari kelompok ini, sedangkan kelompok “elite masyarakat” hanya berfungsi sebagai penerjemah “kebijakan dan rencana pembangunan” sekaligus mengorganisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

2.3 Smart City

Smart city adalah konsep kota masa depan yang ingin diwujudkan secara nasional agar terwujud kota keberlanjutan yang didukung oleh kapasitas daya saing yang memadai. Menurut Bappenas dalam Nuh dan Winoto (2017: 132) bahwa terdapat enam komponen penting sebagai fungsi dari smart city. Pertama, smart environment adalah komponen dasar pengelolaan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan sumber energi terbarukan berbasis pada IT. Kedua, smart infrastructure adalah komponen dasar yang mendukung sistem pergerakan atau mobilitas penduduk dan ketersediaan infrastruktur penunjang melalui pengembangan jaringan informasi teknologi, pengembangan transportasi berbasis IT, dan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT. Ketiga, smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas. Smart governance memungkinkan memudahkan pekerjaan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan,

mengoptimalkan nilai demokrasi dan partisipasi, menegakkan keadilan, menjalankan fungsi transparansi, akuntabilitas dan profesional, serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Keempat, smart ekonomi adalah pendekatan yang dikembangkan melalui pendekatan ekonomi menggunakan akses teknologi informasi. Smart ekonomi mengarah kepada pengembangan kewirausahaan dan e-commerce. Kelima, smart people adalah upaya membangun modal manusia yang terdidik dan terlatih dalam mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terakhir, smart living adalah kemudahan akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, permukiman dan jaminan keamanan yang layak. Smart living mengacu pada kualitas hidup yang dipegaruhi oleh kebutuhan dasar, kebutuhan keamanan, kebutuhan keselamatan, kebutuhan akan kemudahan dan kenyamanan hidup.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh (Afrizal,2015:102). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau bahan pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menggambarkan peran Politik Pembangunan di Kota Palangka Raya menuju Smart City Kota Palangka Raya.

4. Diskusi dan Kesimpulan

Menurut Soekanto (2005:437), Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan yang terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar terencana, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah-arah perubahan lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2006), pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Menurut Deddy T. Tikson (2005:132), bahwa pembangunan dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya yang secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi, transformasi dalam struktur sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme,

Adapun pembangunan menurut (Tjahja, 2000:54) adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Terkait dengan hal itu konsep pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrati masyarakat mempunyai kecenderungan untuk merubah hidup dan kehidupan sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu pendekatan masyarakat dititik beratkan pada lingkungan sosial ekonomi yang bercirikan:

1. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti terwujudnya pemerataan pendapatan dan mewujudkan keadilan.
3. Pembangunan yang di orientasikan kepada masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia.

Dari konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Kota Palangka Raya merupakan suatu usaha perubahan Kota Palangka Raya untuk menjadi kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma - norma tertentu. Menuju modernitas secara bertahap dengan mendayagunakan potensi baik alam, manusia, maupun sosial dan budaya.

Kantaprawira (Warjio, 2016:218) Aktor dalam suatu sistem

politik dapat berwujud perseorangan atau kelompok, baik kecil maupun besar dan tidak fokus pada gender tertentu yang kesemuanya menjalankan berbagai peranan. Aktor-aktor tersebut dapat dinyatakan sebagai struktur. Peranan suatu struktur singular maupun komposit ditentukan oleh harapan dari orang lain atau pelaku peran sendiri. Memahami siapa aktor politik pembangunan, Norman Long (Warjio, 2016:217) memberikan perspektif yang lebih luas lagi. Menurut Norman Long dalam *Development Sosiologi : Actor Perspektif*, aktor-aktor pembangunan adalah sangat kompleks dan banyak yang berasal dari peneliti, para agen, pengintervensi atau bahkan mereka-mereka di tingkat lokal yang memiliki pengaruh, baik dari segi kekuasaan atau dalam satu wilayah atau arena tertentu. Ciri actor pembangunan adalah mereka memilik banyak relasi dan kepentingan baik ditingkat makro maupun mikro. Adapun di tingkat internasional mereka adalah individu dan kelompok swasta yang berada di rata-rata rasional dan menghindari resiko dan yang mengatur pertukaran dan tindakan kolektif untuk mempromosikan

Kepentingan yang berbeda di bawah kendala yang dikenakan oleh kelangkaan bahan, nilai-nilai yang saling bertentangan dan variasi dalam pengaruh sosial. Aktor politik pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana mobilitas yang dijalankannya terkait dengan pembangunan. Winters (Warjio, 2016:19) dalam bukunya *Power in Motion: Modal Berpindah Bertambah mengungkapkan bahwa aktivitas aktor politik pembangunan adalah moda investor (investor*

mobility) yang mengacu pada kekuatan penanaman modal asing langsung (*direct foreign investment*) yang bersifat jangka panjang dalam memengaruhi kebijakan pemerintah, sehingga pada gilirannya mengubah struktur kekuasaan (*structural power*) atau konfigurasi struktur kekuasaan sehingga pembangunan dapat berjalan. Adapun aktor politik pembangunan adalah para elite itu sendiri. Bagi Tom Bottomore, para elite walaupun jumlahnya sedikit, seperti sebuah puncak piramida namun mereka sangat menentukan dan berkuasa dalam dinamika masyarakat, termasuk dalam pembangunan. Mereka bisa berada dalam birokrasi ataupun dalam masyarakat mereka sendiri. Sistem-sistem politik sangat memengaruhi bagaimana mereka berkuasa dan menjalankan kekuasaannya.

Menurut Warjio (2016: 220) Dalam kajian politik, negara adalah aktor yang terbentuk secara sistemik sebagai sebuah institusi dengan kekuasaannya yang besar. Sebagai sebuah institusi dalam Negara terdapat banyak substansi yang bergerak dengan tugasnya dan saling terhubung. Negara sebagai aktor politik pembangunan biasanya untuk memuluskan kebijakan program pembangunannya melakukan beberapa hal berikut:

1. Menciptakan politik yang bebas dari konflik ideologis dan berdasarkan atas ketertiban dan konsensus.
2. Membatasi partisipasi politik yang pluralistic. Partisipasi rakyat harus dilaksanakan dalam upaya penerapan pembangunan yang dirancang oleh elit penguasa

Dalam menelaah perubahan yang terjadi di Kota Palangka Raya,

menurut pandangan Warjio (2016: 207) dalam bukunya *politik pembangunan: Paradokss, Teori, Aktor dan Ideologi*, setidaknya ada dua komponen pendorong perubahan. *Pertama*, perubahan-perubahan yang bersifat otonomi karena masyarakat menginginkan adanya pergeseran kearah kondisi social atau taraf hidup yang lebih maju. Dengan kata lain, perubahan ini terjadi karena rakyat memang menghendaknya sebagai naluri yang wajar untuk mencapai derajat kemakmuraan, keadilan dan kesejahteraan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini aktor politik pembangunan ini sangatlah banyak dan luas bidang-bidang keahliannya aktor-aktor politik pembangunan Kota Palangka Raya ini bukan saja mewakili lapisan tengah tetapi juga mewakili lapisan bawah juga dalam struktur sosial masyarakat. Mereka tidak banyak tetapi memiliki kemampuan dan pengaruh yang mampu mengendalikan.

Mereka bergerak sesuai dengan kepentingannya dan keahliannya baik dalam kelembagaan maupun secara sendiri. Dalam hal ini, dari banyak lapisan stratifikasi dan keluasan keahlian aktor politik pembangunan Kota Palangka Raya dapat di kelompokkan dalam empat jenis. Empat aktor itu ialah pemerintah Kota Palangka Raya, swasta yang ada di Kota Palangka Raya, masyarakat sipil yang berada di Kota Palangka Raya dan individu – individu yang berada di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan konsep smart city yang telah terbagi ke enam komponen, Giffinger (2007) dan Cohehen (2013) dalam Nuh dan Winoto (2017: 133-134) menyampaikan indikator sebagai

tolak ukur penyelenggaraan smart city. Adapun indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) *Smart economy* dengan indikator semangat inovatif (*innovative spirit*), kewirausahaan (*enterpreunership*), citra & merek dagang ekonomi (*economi image & trademarks*), produktivitas (*productivity*), fleksibilitas pasar tenaga kerja (*flexibility of labour market*), keterikatan internasional (*international embeddedness*), dan keterkaitan lokal & global (*local & global interconnectedness*).
- 2) *Smart people* dengan indikator tingkat kualifikasi (*level of qualification*), afinitas terhadap pembelajaran sepanjang hayat (*affinity to lifelong learning*), kemajemukan sosial dan etnis (*social and ethnic plurality*), fleksibilitas (*flexibity*), kreativitas (*creativity*), keterbukaan pikiran (*open mindedness*), partisipasi dalam kehidupan publik (*participation in public life*), dan pendidikan (*education*).
- 3) *Smart governance* dengan indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan (*indikator participation in decision making*), layanan sosial dan publik (*public and social services*), tata kelola transparan (*transparant governance*), strategi & perspektif politik (*political strategies & perspective*), kebijakan permintaan (*demand policy*), transparansi & keterbukaan data (*transparency & open data*), dan Teknologi Informasi Kompter & pemerintah (*ICT & government*).
- 4) *Smart mobility* dengan indikator aksesibilitas lokal (*indikator local accessibility*), aksesibilitas internasional (*international accessibility*), infrastruktur Teknologi Informasi Kompter (*ICT infrastructure*), sistem transportasi dan inovatif yang berkelanjutan (*sustainable innovative and transport system*), dan akses modal campuran (*mixed modal access*).
- 5) *Smart Environtment* dengan indikator kondisi alam (*indicator natural conditions*), polusi (*pollution*), perlindungan lingkungan (*environment protection*), pengelolaan sumber daya berkelanjutan (*sustanaible resources management*), bangunan yang ramah lingkungan (*green building*), energi yang ramah lingkungan (*green energy*), perencanaan kota yang ramah lingkungan (*green urban planning*).
- 6) *Smart living* dengan indikator kondisi budaya fasilitas kesehatan (*indikator cultural facilities health conditions*), keselamatan individu (*individual safety*), kualitas hausing (*hausing quality*), fasilitas pendidikan (*education facilities*), daya tarik wisata (*touristic attractiveness*), dan kohesi sosial (*social cohesion*).

Indonesia sudah menerapkan smart city seperti Bogor, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Seperti di Bogor membuat Bogor Green Room (BGR). Hal tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Bogor, ITB, dan Telkom Group ini akan digunakan sebagai pusat data dan informasi akurat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam persoalan kependudukan, lingkungan, dan keseharian warga dibutuhkan strategi dengan menggunakan perangkat teknologi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Seperti memantau kondisi transportasi, kondisi darurat, dan peringatan terjadinya bencana.

Dari konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Kota Palangka Raya merupakan suatu usaha perubahan Kota Palangka Raya untuk menjadi kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma - norma tertentu. Menuju modernitas secara bertahap dengan mendayagunakan potensi baik alam, manusia, maupun sosial dan budaya.

Kesimpulannya, smart city harus mampu membuat masyarakatnya aktif dalam beraktivitas, melakukannya dengan tenang, aman, nyaman, senang, dan bahagia tinggal didalamnya dan yang paling penting lagi masyarakat sipil yang berada di Kota Palangka Raya dan individu – individu yang berada di Kota Palangka Raya berperan dan berpartisipasi sebagai actor dalam pembangunan politik. Akan tetapi berdasarkan hasil yang dibahas maka Dalam hal ini untuk menuju Kota Palangka Raya menuju smart city adalah aktor politik pembangunan itu sendiri maka sangatlah banyak dan

luas bidang-bidang keahliannya sebagai aktor-aktor politik pembangunan Kota Palangka Raya ini bukan saja mewewakili lapisan tengah tetapi juga mewakili lapisan bawah juga dalam struktur sosial masyarakat. Mereka tidak banyak tetapi memiliki kemampuan dan pengaruh yang mampu mengendalikan.

Dalam hal ini, dari banyak lapisan stratifikasi dan keluasan keahlian aktor politik pembangunan di Kota Palangka Raya dapat di kelompokkan dalam empat jenis. Empat aktor itu ialah pemerintah Kota Palangka Raya, swasta yang ada di Kota Palangka Raya, masyarakat sipil yang berada di Kota Palangka Raya dan individu – individu yang berada di Kota Palangka Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Nuh dan Winoto, 2017. *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*. Malang: UB Press.
- Rahardjo. 2013. *Teori – Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta; Graha Ilmu.

- Soekanto, Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Supriatna Tjahja. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Setiawan, Ferry. 2019. *Kolaborasi yang Dilaksanakan di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya*, Jurnal Administratio, Vol. 10 No 2.
- Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar : Gemilang Persada
- Todaro, M. 2006. *Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Warjio. 2016. *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta, PT.Fajar Interpratama.
- Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Sumber Perundang-Undangan :

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2018 Tentang rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan /Sustainable Development Goals Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2021